LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 3

TAHUN 1989

SERI : B

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 4 TAHUN 1988 (4/1988)

TENTANG
PENGATURAN PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 telah diserahkan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tersebut, dengan Berita Acara pada tanggal 17 Oktober 1980 telah dilaksanakan serah terima secara nyata dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 12 (dua belas) Urusan dalam Bidang Kepariwisata antara lain Urusan Pramuwisata;
- c. bahwa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah Tujuan Wisata Utama, maka perlu memberikan pelayanan yang memadai kepada para Wisatawan;
- d. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan perlu adanya Pramuwisata yang merupakan salah satu unsur yang penting dalam bidang Kepariwisata.
- e. bahwa Pramuwisata perlu dibina, diarahkan dan ditingkatkan kemampuannya agar senantiasa dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moral dan kepribadian Bangsa Indonesia;
- f. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengaturan Pramuwisata.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I jo Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata nasional jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dalam Membina Pengembangan Kepariwisata Nasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73/KP/103/Phb-80 tentang Persyaratan dan Tugas Pemimpin Perjalanan Wisata dan Pramuwisata;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor: Kep-21/U/IV/80 tentang Ketentuan Pelaksanaan Persyaratan dan Tugas Pemimpin Perjalanan Wisata dan Pramuwisata;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor: Kep-01/U/IX/78 tentang Penyelenggaraan Penataran Pramuwisata;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGATURAN PRAMUWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Pramuwisata ialah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada Wisatawan mengenai Obyek Wisata;
- f. Pramuwisata Umum ialah Pramuwisata yang mempunyai pengetahuan secara umum dan berpengalaman mengenai obyek Wisata;
- g. Pramuwisata Khusus ialah Pramuwisata yang mempunyai pengetahuan secara mendalam dan berpengalaman mengenai Obyek Wisata tertentu;
- h. Obyek Wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi Wisatawan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pramuwisata di Daerah;
- b. Meningkatkan pelayanan di Bidang Kepariwisata;
- c. Meningkatkan lapangan pekerjaan di Bidang Kepariwisata.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN KEGIATAN PRAMUWISATA

Pasal 3

Pramuwisata digolongkan atas:

- a. Pramuwisata Umum;
- b. Pramuwisata Khusus.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pramuwisata Umum adalah mendampingi dan memberikan bimbingan, penerangan, petunjuk serta penjelasan secara mendalam kepada Wisatawan tentang Obyek Wisata yang dikunjungi.
- (2) Kegiatan Pramuwisata Khusus adalah mendampingi dan memberikan

bimbingan, penerangan, petunjuk serta penjelasan secara mendalam kepada Wisatawan tentang Obyek Wisata tertentu.

BAB IV
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA
MENJADI PRAMUWISATA

Pasal 5

Untuk menjadi Prawisata harus memiliki Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata.

Pasal 6

Syarat-syarat menjadi Pramuwisata:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau yang memiliki pengetahuan/pengalaman yang sederajat;
- c. Umur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing secara aktif dan lancar;
- e. Menguasai pengetahuan tentang Obyek-obyek Wisata dan ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan Wisata;
- f. Sehat fisik dan mental;
- g. Berkelakuan baik.

Pasal 7

- (1) Setiap calon Pramuwisata untuk menjadi Pramuwisata mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai dengan golongan Pramuwisata yang dikehendaki sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Persetujuan/penolakan permohonan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (3) Setiap calon Pramuwisata yang permohonannya diterima, wajib mengikuti pendidikan kepramuwisataan;
- (4) Bagi yang dinyatakan selesai mengikuti pendidikan dan lulus ujian Pramuwisata, diberikan Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Tanda Pengenal Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

BAB V
WILAYAH KERJA PRAMUWISATA

Pasal 9

- (1) Pramuwisata Umum melakukan tugasnya di dalam Daerah tempat Sertifikat dibuat.

- (2) Pramuwisata Khusus melakukan tugasnya di dalam Obyek Wisata tertentu yang dicantumkan dalam Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata yang dimiliki.
- (3) Apabila Pramuwisata Umum memasuki Wilayah tugas Pramuwisata Khusus, Pramuwisata Umum hanya bertugas mendampingi Pramuwisata Khusus dan apabila Pramuwisata Khusus memasuki Wilayah tugas Pramuwisata Umum, Pramuwisata Khusus hanya bertugas mendampingi Pramuwisata Umum.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Wilayah Kerja dimana Pramuwisata Umum dan Pramuwisata Khusus melaksanakan tugasnya.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pramuwisata berhak memperoleh upah kerja dan perlakuan yang layak dari pemakai jasa.

Pasal 12

Pembatalan pesanan pelayanan Pramuwisata oleh pemakai jasa berlaku ketentuan-ketentuan upah kerja sebagai berikut:

- a. Pembatalan yang dilakukan sebelum 24 (dua puluh empat) jam dari waktu yang telah ditentukan, tidak dikenakan pembayaran.
- b. Pembatalan yang dilakukan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dari waktu yang telah ditentukan, dikenakan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- c. Pembatalan yang dilakukan setelah Pramuwisata sudah berada di tempat yang ditentukan tepat pada waktunya, dikenakan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Pembatalan yang dilakukan setelah Pramuwisata menunggu di tempat yang ditentukan 1 (satu) jam atau lebih dari waktu yang telah ditentukan, dikenakan pembayaran 100% (Seratus persen).

Pasal 13

Dalam melakukan tugasnya setiap Pramuwisata wajib:

- a. Memakai Tanda Pengenal Pramuwisata;
- b. Bertingkah laku yang baik dan sopan;
- c. Mematuhi acara perjalanan (Tour Itinerary) yang telah ditetapkan;
- d. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan Kepariwisataaan;
- e. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang benar;
- f. Berpakaian sopan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Pramuwisata wajib berperan dalam upaya

pengamanan yang meliputi Keamanan Negara, Ketertiban Umum/Masyarakat, Obyek Wisata, diri pribadi Wisatawan dan harta benda Wisatawan.

Pasal 15

Pramuwisata Umum dan Pramuwisata Khusus diwajibkan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Pariwisata.

BAB VII LARANGAN

Pasal 16

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan Pramuwisata yang tidak memiliki Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata.
- (2) Pramuwisata dilarang:
 - a. Meminta uang atau barang dari penjual atau orang lainnya yang berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh Wisatawan yang diurus;
 - b. Memaksa Wisatawan untuk menggunakan jasa-jasanya;
 - c. Melakukan tugas tanpa memakai Tanda Pengenal;
 - d. Merubah acara perjalanan yang sudah ditetapkan tanpa persetujuan dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya;
 - e. Melalaikan waktu yang telah ditetapkan dalam tugasnya;
 - f. Melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh Wisatawan di luar bidang tugas Kepariwisataaan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ayat (2) Pasal ini, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat tegoran.
- (4) Sertifikat dan Tanda Pengenal dapat dicabut apabila Pramuwisata ternyata:
 - a. masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini meskipun telah diberi surat tegoran.
 - b. memperoleh Sertifikat dan Tanda Pengenal secara tidak sah.
 - c. menjalankan tugas yang baertentangan dengan Sertifikat yang diberikan.
 - d. alasan kesehatan yang tidak memungkinkan meneruskan tugasnya dengan baik.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata dikenakan Retribusi Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata.
- (2) Untuk memperoleh Tanda Pengenal Pramuwisata Ulang dikenakan

Retrisbusi Daftar Ulang Tanda Pengenal Pramuwisata.

Pasal 18

- (1) Besarnya Retribusi Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata bagi Pramuwisata Umum adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya Retribusi Daftar Ulang Tanda pengenal Pramuwisata Umum adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Besarnya Retribusi Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata bagi Pramuwisata Khusus adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya Retribusi Daftar Ulang Tanda Pengenal Pramuwisata bagi Pramuwisata Khusus adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 20

Hasil pungutan Retribusi sebagaimana tersebut Pasal 17 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 21

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pramuwisata ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait secara koordinasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas menyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI SANKSI

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Bagi Pramuwisata yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dicabut Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisatanya.
- (2) Pencabutan Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bagi Pramuwisata yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapat Tanda Pengenal Pramuwisata, wajib mendaftarkan diri kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Pramuwisata baik yang belum memiliki Tanda Pengenal maupun yang telah habis masa berlakunya, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 7 Juni 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

ttd,

PARWOTO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Seri : B
Nomor : 3
Tanggal : 6 Juni 1989

Disahkan Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan :

Nomor : 556.34.207
Tanggal : 13 Maret 1989

Sekretaris Wilayah Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

DRS. SUPRASTOWO
NIP. 490008854

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 1988

TENTANG
PENGATURAN PRAMUWISATA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang

Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, Urusan Pramuwisata termasuk salah satu urusan dari 12 (dua belas) urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tersebut telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor : 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan di atas, telah dilaksanakan penyerahan secara nyata dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 12 (dua belas) urusan dalam Bidang Kepariwisata dalam Berita Acara pada tanggal 17 Oktober 1980, antara lain Urusan Pramuwisata.

Dalam rangka menata ketentuan-ketentuan persyaratan tenaga Pramuwisata oleh Pemerintah telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.73/KP.103/Phb-80 tentang Persyaratan dan tugas Pemimpin Perjalanan Wisata dan Pramuwisata. Sebagai pelaksanaan Keputusan/Menteri Perhubungan Nomor : KM.73/KP.103/Phb-80 tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor : Kep.21/U/IV/80 tentang Ketentuan Pelaksanaan Persyaratan dan Tugas Pemimpin Perjalanan Wisata dan Pramuwisata.

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur Pramuwisata dengan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 434/1974 tentang Kartu Tanda Pramuwisata, dimana dalam Keputusan tersebut antara lain mengatur:

- Untuk dapat melakukan kegiatan Kepramuwisataan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang Pramuwisata diharapkan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (Guide Licence) yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah.
- Kartu Tanda Pramuwisata yang diberikan kepada Pramuwisata yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Pramuwisata wajib menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisatanya jika diminta oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan atau para Wisatawan.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah tujuan Wisata Utama, maka perlu memberikan pelayanan yang memadai kepada para Wisatawan.

Dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan perlu adanya Pramuwisata yang merupakan ujung tombak dalam bidang Kepariwisata. Oleh karena itu sebagai upaya mengembangkan Kepariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pramuwisata perlu dibina, diarahkan dan ditingkatkan

kemampuannya agar senantiasa dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Untuk tercapainya maksud di atas serta menjamin peranan Pramuwisata secara baik sesuai dengan moral dan kepribadian Bangsa Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengaturan Pramuwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1)
dan (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pendidikan Kepramuwisata
diselenggarakan oleh suatu Panitia
yang dibentuk Gubernur, yang
diketuai Kepala Dinas Pariwisata.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Perpanjangan Tanda Penenal
Pramuwisata hanya dapat diberikan
setelah yang bersangkutan antara
lain:
- melaksanakan ketentuan Pasal
15 Peraturan Daerah ini;
- mengikuti Kursus Penyegara
yang diberikan oleh Dinas
Pariwisata.
- Pasal 9 s/d Pasal 12: Cukup jelas.
- Pasal 13 huruf a
s/d d: Cukup jelas.
huruf e : Yang dimaksud adalah, tidak
dibenarkan Pramuwisata memberikan
informasi dan penjelasan yang dapat
menimbulkan kerugian Negara,
merusak citra suku bangsa, agama
dan Kepercayaan serta
Kepariwisata Nasional.
Pramuwisata harus senantiasa ikut
menciptakan iklim yang baik bagi
pengembangan Kepariwisata.
- huruf f : Cukup jelas;
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan:
- Keamanan Negara misalnya
pengamanan terhadap
penyalahgunaan narkotika,
pengedaran uang palsu,
penyelundupan.
- Ketertiban Umum/masyarakat
misalnya menjunjung tinggi
nilai-nilai budaya yang
dijunjung tinggi dan dihormati
masyarakat.
- Obyek Wisata misalnya

			<ul style="list-style-type: none"> pengamanan pengamanan terhadap pencurian benda-benda purbakala. - Diri pribadi Wisatawan misalnya perlindungan dari kemungkinan yang bersumber pada obyek Wisata dan hal-hal di luar Obyek Wisata. - Harta benda Wisatawan misalnya waspada terhadap pencurian.
Pasal 15 dan Pasal 16	:		Cukup jelas;
Pasal 17 ayat (1)	:		Cukup jelas;
ayat (2)	:		Maksud Tanda Pengenal Pramuwisata Ulang adalah untuk pembinaan, sehingga dikenakan Retribusi.
Pasal 18 dan Pasal 19	:		Cukup jelas;
Pasal 20	:		Hasil pungutan retribusi, diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pariwisata dan disetor ke Kas Daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 21	:		Yang dimaksud dengan Instansi lain yang terkait antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; - Kepolisian setempat; - Biro Bina Pemerintahan Umum Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Bagian Ketertiban. - Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. - Kantor Suaka dan Peninggalan Purbala.
Pasal 22 s.d Pasal 24	:		Cukup jelas;
Pasal 25 ayat (1)	:		Cukup jelas;
ayat (2)	:		Sebelum dilaksanakan pencabutan terlebih dahulu diberikan peringatan.
Pasal 26 s.d Pasal 29	:		Cukup jelas.